

MODEL HIPOTETIK LAYANAN ADVOKASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL KELOMPOK MIKROSISTEM DI SMP NEGERI KOTA BEKASI

Gantina Komalasari¹

Susi Fitri²

Bella Yugi Fazny³

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengembangkan dan menguji kelayakan rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. Rancangan layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengetahuan pelecehan seksual dan tes pengetahuan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kelompok mikrosistem. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development (RnD), dengan pelaksanaan langkah penelitian dibatasi hingga tahap ke 9 yakni merevisi rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling berdasarkan hasil dari analisis uji ahli.

Rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini telah diujikan oleh dua pakar ahli yaitu ahli bimbingan dan konseling dan ahli pengguna yaitu guru bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi formatif dari uji ahli adalah mayoritas aspek rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dinilai baik dan sangat baik. Semua hasil koreksi uji ahli telah diperbaiki oleh peneliti sehingga rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini dikategorikan baik dan layak.

Hasil penelitian ini berupa rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. Kesimpulannya rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling mengenai pengetahuan pelecehan seksual dalam penelitian ini sudah layak digunakan untuk diujicobakan secara terbatas hingga luas. Rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling ini mendapat penilaian baik dan sangat baik pada sebagian besar aspek komponen yang terdapat dalam rancangan layanan. Hal ini mengindikasi bahwa rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling mengenai pengetahuan pelecehan seksual memiliki materi yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, memiliki metode yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memiliki media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran, serta melakukan asesmen kebutuhan yang tepat sehingga kesesuaian antara tujuan, metode, materi dan media dapat mendukung ketersediaan layanan advokasi bimbingan konseling.

Kata kunci : Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling, Pelecehan Seksual, SMP Negeri Kota Bekasi.

Abstract

The purpose of this research is to develop and test the design of advocacy services guidance and counseling In Sexual Harassment Case Mikrosystem Group at Public

¹ Dosen Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, gantina.komalasari2803@gmail.com

² Dosen Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, susi.fitri.kuliah@gmail.com

³ Mahasiswa Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, bellayugi07@gmail.com

Junior High School Bekasi. Design of this services has been developed to increase knowledge about Sexual Harassment Case at Mikrosystem Group. Instrument that has been used in this research is testing of knowledge about sexual harassment and test about advocacy services guidance and counseling Mikrosystem Group. The method of this research is research and development (RnD), with the implementation has limited to stage 9 which is the design of advocacy services guidance and counseling has been revised based on result from expert test analysis.

Design of services advocacy guidance and counseling in this research has been tested by two expert which is expert of guidance and counseling and expert user which is guidance and counseling teacher. Formatif evaluation result from expert test is majority aspect of design services advocacy guidance and counseling has good and very good assessment. All of expert corection result has been revised by researcher so design services advocacy guidance and counseling in this research has categorized good and feasible.

The result of this research is design services advocacy guidance and counseling In Sexual Harassment Case Mikrosystem Group at Public Junior High School Bekasi. Conclusion of the design services advocacy guidance and counseling about sexual harassment in this research is feasible and can be use both for limited and not limited. Design services advocacy guidance and counseling has good and very good assessment result in most of aspect which is in design services. This indicates that Design services advocacy guidance and counseling about sexual harassment knowledge have enough content which is suitable for study purpose, has suitable method for the aim purpose, has study media which is suitable for sudy activity, and also conduct assestment needed to make it suitable between aim, method, content and media which is support for availability services advocacy guidance and counseling.

Keyword : services advocacy guidance and counseling, sexual harassment, Public Junior High School Bekasi.

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Bekasi diketahui menjadi salah satu kasus yang belum mendapat penanganan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di tahun 2016 pada 42 orang guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP di wilayah Bekasi ditemukan bahwa dalam rentang waktu satu hingga dua tahun terdapat 35 orang guru BK yang pernah menerima laporan masalah pelecehan seksual di sekolah, dan 7 orang guru BK tidak pernah menerima laporan terkait masalah pelecehan seksual. Korban dari pelecehan seksual tersebut dilaporkan oleh 33 orang guru BK SMP adalah peserta didik berjenis kelamin perempuan, dan 2 orang guru BK SMP lainnya menyebutkan korbannya adalah peserta didik laki-laki.

Pelaku dari pelecehan seksual ini dilaporkan sangat beragam, dari 35 orang guru BK SMP yang mendapatkan laporan, 31 orang guru BK menyatakan bahwa pelaku dari kasus pelecehan seksual adalah sesama peserta didik, 2 orang guru BK menjawab pelaku adalah dari keluarga peserta didik, 1 orang guru BK menjawab pelaku adalah guru atau tenaga pengajar disekolah, 1 orang guru BK menjawab pelaku adalah Office Boy atau satpam sekolah, dan 1 orang guru BK menjawab pelaku adalah teman korban diluar sekolah.

Kasus pelecehan seksual ini memiliki keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru di sekolah mengenai bentuk pelecehan seksual yang mempengaruhi cara penanganan kasus pelecehan seksual di sekolah. Berdasarkan data penelitian Utomo et, al (2012) mayoritas guru di provinsi Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan memilih menangani kasus pelecehan seksual di sekolah

dengan menenangkan peserta didik korban pelecehan seksual (97 persen), melaporkan pada orang tua (82 persen), dan mendiskusikan dengan sesama guru (96 persen).

Hasil studi pendahuluan tentang pengetahuan pelecehan seksual pada tahun 2017 diketahui bahwa tingkat pengetahuan pelecehan seksual 38 orang guru dan staf karyawan di 3 sekolah SMP Negeri di Kota Bekasi terkategori sedang. Hasil tes pengetahuan pelecehan seksual 63 orang peserta didik di 2 sekolah SMP Negeri di Bekasi juga ditemukan terkategori sedang. Maka berdasarkan hasil studi pendahuluan dan hasil penelitian Utomo, et.al (2012) penelitian ini bertujuan mengingkatkan pengetahuan pelecehan seksual kelompok mikrosistem sekolah.

Data lain yang berhasil peneliti temukan saat studi pendahuluan di tahun 2016 adalah menurut 31 orang guru BK SMP, selama ini penanganan masalah pelecehan seksual mayoritas secara kekeluargaan dengan pemanggilan korban atau pelaku, kesiswaan, wali kelas dan orang tua peserta didik. Selanjutnya pelaku atau korban akan diberikan arahan oleh kesiswaan hingga akhirnya dilanjutkan penanganan ke guru BK SMP untuk diberikan layanan konseling individu dan pendalaman rohani.

Selama ini 13 orang guru BK SMP sudah melaksanakan program layanan preventif sebagai upaya meminimalisir terjadinya pengulangan masalah pelecehan seksual. Layanan preventif yang dimaksud berupa bimbingan klasikal dengan memberikan materi informasi kesehatan reproduksi, norma-norma lingkungan, saran, nasihat dan materi orientasi dari pihak puskesmas serta kepolisian. Namun upaya penanganan dan bimbingan klasikal ini berdasarkan hasil evaluasi program yang telah guru BK tersebut lakukan, dinilai belum cukup efektif dalam mengurangi dan menangani permasalahan pelecehan seksual di sekolah.

Seluruh narasumber studi pendahuluan yaitu 42 orang guru BK, mereka menilai sangat dibutuhkan ketersediaan program layanan

advokasi BK mengenai masalah pelecehan seksual di sekolah, meskipun penyediaan layanan advokasi pelecehan seksual diakui oleh 31 orang guru BK SMP di Bekasi belum disediakan. Alasan belum disediakannya menurut 11 orang guru BK diantaranya: (1) beberapa rekan kerja guru bidang studi di sekolahnya menilai materi terkait pelecehan seksual dianggap tidak pantas untuk diajarkan pada peserta didik (tabu), (2) peran guru BK menjadi pilihan terakhir dalam penanganan kasus pelecehan seksual di sekolah, (3) belum tersedianya waktu pelaksanaan, ruang pelaksanaan dan fasilitas sekolah belum memadai untuk disediakan layanan tersebut, (4) guru BK mengalami kesulitan saat berkoordinasi dengan kesiswaan, (5) guru BK memiliki pemahaman terkait pelaksanaan layanan advokasi bimbingan dan konseling belum begitu baik, (6) sulitnya berkerja sama dengan lembaga lain, (7) sulitnya berkoordinasi dengan orang tua peserta didik maupun stakeholder karena kekhawatiran masalah pelecehan seksual ini meluas (aib), dan (8) guru BK mengatakan bias gender yang terkonstruksi di dalam lingkungan masyarakat sangat tinggi sehingga membuat korban pelecehan seksual malu dan menutup diri. Korban pelecehan seksual terus mengalami "blame the victim" dari saksi dan lingkungan sekitar sehingga membuat masalah pelecehan seksual ini sulit terusut.

Penelitian ini akan mengembangkan sebuah layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual yang layak untuk membantu atau mempermudah kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah dalam mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual.

ACUAN TEORITIK

Teori layanan advokasi bimbingan dan konseling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Toporek (2000) yaitu advokasi terdiri dari beberapa aspek pemberdayaan individu atau kelompok dengan membantu, mengenali, dan mengatasi hambatan sosial politik untuk suatu kesejahteraan, berupa tindakan dalam bentuk

aksi sosial. Selain Toporek layanan advokasi dalam penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 111 (2014) yang menyebutkan kegiatan layanan advokasi terkategori dalam layanan di luar kelas. Layanan advokasi merupakan peluasan empat komponen layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif dan dukungan sistem. Layanan advokasi dapat dilakukan dalam masing-masing empat komponen layanan bimbingan dan konseling. Permendikbud nomor 111 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah (2014) juga menjelaskan layanan advokasi adalah layanan yang membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif, dengan memberi pendampingan peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal.

Acuan sumber teori pelecehan seksual yang dipergunakan dalam penelitian ini dari Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi Pelecehan Seksual (2012) yaitu pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Pengertian lain pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diharapkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain,

yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya.

Peneliti juga mensintesikan pengembangan layanan advokasi BK ini menggunakan model sistem advokasi konselor sekolah professional yang dikembangkan oleh Cigrand et.al bahwa pembangunan manusia dipengaruhi secara timbal balik melalui keterlibatan manusia di empat sistem yang saling terkait, disebut sebagai mikrosistem, mesosistem, exosistem, dan makrosistem. Secara spesifik pada penelitian ini mengembangkan wilayah mikrosistem karena menimbang belum terlaksananya layanan advokasi BK berdasarkan hasil studi pendahuluan. Model Cigrand tersebut disintesikan dengan teori pengembangan program BK Komprehensif di sekolah milik Gysbers dan Henderson (2006) yaitu terdapat empat elemen besar tahapan pengembangan BK di sekolah yaitu (1) konten, (2) kerangka kerja organisasi, (3) sumber daya (4) pengembangan, manajemen dan akuntabilitas. Serta disintesikan juga dengan kerangka kerja layanan advokasi konselor sekolah yang dikembangkan oleh House dan Martin (1998) yaitu kerangka kerja advokasi konselor disekolah terbagi menjadi tiga bagian yaitu berkerja dengan peserta didik, berkerja dengan sistem sekolah dan berkerja dengan komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian pengembangan layanan advokasi BK ini akan menggunakan metode penelitian *Research and Development* (R&D). Metode penelitian R&D dipilih peneliti karena metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni menghasilkan suatu produk berupa pengembangan program layanan advokasi bimbingan konseling. Borg dan Gall (2003) mengadaptasi model pendekatan sistem Dick dan Carey yaitu terdapat 10 langkah pelaksanaan strategi R&D yang meliputi (1) Mengukur kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan (*Assess needs to identify goal*), (2) Melakukan analisis

pembelajaran (*Conduct an instructional analysis*), (3) Menganalisis peserta didik dan keadaannya (*Analyze learners and contexts*), (4) Merumuskan tujuan pembelajaran (*Write performance objectives*), (5) Mengembangkan instrumen penilaian (*Develop assessment instruments*), (6) Mengembangkan strategi pembelajaran (*Develop instructional strategy*), (7) Mengembangkan dan menentukan materi pembelajaran (*Develop and select instructional material*), (8) Merancang dan melakukan evaluasi formatif dari pembelajaran (*Design and conduct formative evaluation of instruction*), (9) Revisi program pembelajaran (*Revise instruction*), (10) Merancang dan melakukan evaluasi sumatif (*Design and conduct summative evaluation*) yang kemudian diintegrasikan dengan tahapan pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah milik Gysbers dan Henderson (2006) yaitu (1) Perencanaan, (2) Rancangan, (3) Pelaksanaan, (4) Evaluasi, (5) Peningkatan, dan disesuaikan dengan model layanan advokasi Cigrand et.al (2015) pada level mikrosistem serta kompetensi guru BK/konselor di Indonesia menurut Permendikbud 111 (2003).

HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian berupa produk ancangan layanan advokasi BK (terlampir) yang telah melalui proses pengujian ahli. Pengujian evaluasi formatif yang dilaksanakan pada pengembangan program ini berupa penilaian ahli (*expert judgement*), evaluasi dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2017 oleh Dr. Aip Badrujaman, M.Pd selaku pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi program BK di Universitas Negeri Jakarta serta pada Kamis, 9 Februari 2017 oleh Dra. Ida Rosdiana selaku pengguna program, guru BK di SMP Negeri 19 Bekasi.

Evaluasi dilakukan dengan mengisi rubik instrumen evaluasi program yang telah peneliti kembangkan berdasarkan teori pengembangan program Bimbingan dan Konseling di sekolah milik Gysbers dan Henderson (2006). Empat komponen besar

pengembangan program yang akan dinilai oleh ahli adalah (1) konten : Standar kompetensi; (2) Kerangka kerja organisasi : struktur, elemen waktu, aktivitas; (3) sumber daya; (4) Pengembangan, manajemen dan akuntabilitas. Berdasarkan rubik penilaian dapat disimpulkan hasil evaluasi formatif dari kedua penguji ahli, bahwa secara keseluruhan aspek komponen program mendapat nilai dari baik hingga sangat baik. Namun pada aspek tupoksi kepala sekolah perlu adanya perbaikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi kerja kepala sekolah di lapangan dan tupoksi kepala sekolah. Selain itu perlunya mempertimbangkan kembali penentuan jenis evaluasi yang diambil pada saat kegiatan edukasi pengetahuan pada peserta didik, guru dan staf karyawan. Kesimpulan dari kedua penilaian ahli layanan advokasi BK meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem ini layak dan baik apabila diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Program layanan advokasi BK ini telah direvisi oleh peneliti sesuai pertimbangan masukan para ahli, sehingga sudah baik dan layak untuk dapat diuji cobakan secara terbatas hingga luas. (terlampir)

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil uji hipotetik yang telah dilakukan oleh pakar bidang evaluasi dan supervisi program BK rancangan layanan advokasi BK mengenai pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem di SMP Negeri Bekasi layak untuk dilaksanakan uji coba secara terbatas hingga luas. Pertimbangan ini dapat diputuskan mengingat mayoritas keseluruhan aspek hasil penilaian uji ahli terdapat dalam pengkategorian baik. Kondisi tersebut dapat mengindikasi bahwa layanan advokasi BK mengenai pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem memiliki materi yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, memiliki metode

- yang sudah sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai, memiliki media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan dan metode pembelajaran, serta melakukan evaluasi yang tepat dapat mengukur tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Kesimpulannya rancangan layanan advokasi BK mengenai pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem dapat diterapkan uji coba secara terbatas dan luas pada SMP Negeri di Bekasi.
2. Rancangan layanan advokasi BK mengenai pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem dapat dikatakan layak dan baik setelah dilakukan perbaikan oleh peneliti.
- Implikasi dalam penelitian ini adalah layanan advokasi BK mengenai pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem di SMP Negeri Bekasi dibutuhkan keterlaksanaannya oleh berbagai pihak sekolah. Menimbang rancangan koordinasi dan kolaborasi dalam layanan BK begitu sangat jelas dijelaskan dalam rancangan layanan ini. Layanan ini juga sangat berdampak besar bagi para peserta didik yang dalam meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual dan kemampuan *skill life* pemberdayaan diri melalui kemampuan advokasi diri. Sehingga kelak peserta didik dapat memahami keragaman aturan dalam berperilaku dalam bersosialisasi dan menghargai peranan diri orang lain sebagai laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
- Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan dan implikasi adalah:
1. Berdasarkan temuan data latar belakang masalah dan studi pendahuluan analisis kebutuhan dan ketersediaan dalam penelitian ini, maka layanan advokasi BK mengenai pengetahuan pelecehan seksual adalah program perdana yang spesifik pembahasannya dan hanya dihadirkan di jenjang SMP Negeri. Maka diharapkan bagi para peneliti lain untuk menghadirkan kembali program layanan advokasi BK pada bidang layanan BK lainnya atau pada isu yang sama namun wilayah yang berbeda, seperti layanan advokasi BK langkah kolaborasi penanggulangan masalah pelecehan seksual di sekolah. Sehingga diharapkan dapat membantu mempermudah kinerja guru BK di sekolah dalam menangani masalah pelecehan seksual, meningkatkan kredibilitas guru BK dimata stakeholder, menciptakan kolaborasi mikrosistem yang baik dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dialami oleh peserta didik.
 2. Penelitian ini harus dilanjutkan dengan menguji coba terbatas, dan melanjutkan pada uji coba secara luas agar efektifitasnya dapat dibuktikan
 3. Berdasarkan temuan data lapangan dan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan pada program studi fakultas ilmu pendidikan bimbingan konseling sebagai penyedia pencetak calon guru BK atau konselor muda agar menyediakan matakuliah atau kegiatan pelatihan yang bertemakan edukasi layanan advokasi BK sehingga kinerja guru BK di sekolah hingga masyarakat dapat terbekali dengan pengetahuan advokasi yang cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- .(2012). *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. BKKBN dan UNESCO : Jakarta.
- Borg, W.R., & Gall, M.D. (1989). *Educational Research An Introduction*. New York: Longman
- Cigrand, D. L., Havlik, S.G., Malott, K.M., Jones, S.G. (2015). School Counselors United in Professional Advocacy: A Systems Model. *Journal of School Counseling*, 13(8), 1-48.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). *The Systematic Design of Instruction*. USA:Pearson

- Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2003). *Educational Research An Introduction* (7th ed.). New York: Longman Publishing.
- Gysbers, N.C., & Henderson, P. (2006). *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*. (4th ed.). Alexandria: American Counseling Association.
- House, R.M., & Martin, P.J. (1998). Advocating For Better Futures For All Students: A New Vision For School Counselors. *Journal Education*, 119(2), 284-301.
- Permendikbud no 111 (2014). Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta.
- Toporek, R.L. (2000). Developing a Common LanguageandFrameworkforUnderstanding Advocacy in Counseling. In J. Lewis & L. bradley (Eds.), *Advocacy in counseling: Counselors, clients, and community* (pp. 5–14). Greensboro: Caps Publications.
- Utomo, I.D., McDonald, P.H.T., Utomo, A., & Reimondos, A. (2012). Understanding of sexual harassment among Year 6 and Year 12 students in Jakarta, West Java, West Nusa Tenggara and South Sulawesi. Australian Demographic and Social Research Institute: Australia.

Lampiran

Matriks kurikulum layanan advokasi bimbingan dan konseling kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem adalah sebagai berikut:

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Peserta didik	Peserta didik mampu mengenali pelecehan seksual	Bimbingan Ielas besar/ Seminar	Informasi pengertian pelecehan seksual mengenai : • Defensi Pelecehan Seksual, • Bentuk-bentuk pelecehan seksual, • Dampak Pelecehan Seksual, • Undang-undang perlindungan anak terkait pelecehan seksual, • Kebijakan sekolah terkait pelecehan seksual, • Mekanisme alur pelaporan pelecehan seksual di sekolah, • Mekanisme alur penanganan pelecehan seksual di lembaga instansi	Tayangan film <i>Power point presentation</i> <i>Flash Card</i>	Seminar (presentasi)	Satu semester sekali. 100-120 menit per pertemuan	Guru BK, berk-laborasi dengan narasumber dari kepolisian/ petugas P2TP2A/ petugas KPAI	Evaluasi sesudah seminar, menggunakan tes formatif Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan
Peserta didik	Peserta didik mampu mengenali, memetakan hambatan dan memetakan solusi pelecehan seksual	Layanan advokasi (survey)	Peta survey, mengenali lokasi rawan pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan memetakan hambatan, memetakan solusi pelecehan seksual di tempat tersebut	Angket	FGD (Sebar angket survey)	1 jam/ satu semester sekali	Guru BK	Evaluasi sesudah survei, menyebarkan angket kesesuaian dengan kebutuhan dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan

16 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Peserta didik	Peserta didik mampu mengenali dan mendukung lingkungan anti pelecehan seksual di sekolah	Papan bimbiningan (Kampanye)	Sosialisasi pesan positif pencegahan pelecehan seksual seperti : “Hentikan Pelecehan Seksual” “Mari saling menghormati” “Selamat datang di lingkungan anti pelecehan seksual”	Poster atau Flyer atau papan mading BK atau website / aplikasi smartphone	Kampanye(Pembagian flyer, pemajangan mading/ spanduk, share via media sosial atau elektronik)	10-15 hari se kali / Satu semester sekali	Guru BK berkolaborasi dengan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisi oleh para peserta didik mengenai kegiatan kampanye Laporan dilengkapi dokument dan bukti foto sudah pernah dipasang
Peserta didik	Peserta didik mampu mengenali dan memahami informasi alur pelaporan masalah pelecehan seksual	Pengelolaan leaflet (Kampanye)	Sosialisasi mekanisme SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) alur pelaporan masalah pelecehan seksual dan SOP tata cara menanggapi pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah	Leaflet atau Website atau poster aplikasi smartphone mengenai alur pelaporan pelecehan seksual	Kampanye (sebar leaflet, brosur, poster, atau pesan via website atau aplikasi smartphone)	10-15 hari se kali / Satu semester sekali	Guru BK dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi proses dan hasil, berupa angket yang diberikan kepada peserta didik yang menerima kampanye poster maupun leaflet untuk mengetahui pendapatnya mengenai manfaat yang diperolehnya
Peserta didik								Hasil evaluasi akan disampaikan pada rapat mingguan sekolah disertai leaflet dan bukti dibagikan pada kelompok mikrosistem

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Peserta didik	Peserta didik mampu mengenali, mencegah dan menolong diri sendiri dari pelecehan seksual	Bimbingan kelas besar (Pelatihan Penberdayaan diri)	Cara-cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi atau menemui masalah pelecehan seksual, serta bagaimana SOP alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah.	Tayangan film <i>Flash card</i>	Mutual sharing, Bermain peran,	Satu semester 100-120 menit per pertemuan.	Guru BK, kepolisian, P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi sebelum, menggunakan note harapan dan tujuan Evaluasi hasil, menggunakan contoh kasus, peserta diminta untuk menganalisa kasus yang berisikan upaya perlindungan apa yang perlu dilakukan dalam situasi tersebut dan angket capaian kesesuaian layanan Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan
Komite	Komite mampu mengenali pelecehan seksual	Bimbingan kelas besar (pelatihan)	Informasi pengetahuan pelecehan seksual mengenai : • Definisi pelecehan seksual • Bentuk-bentuk pelecehan seksual • Dampak Pelecehan Seksual, • Undang-undang perlindungan anak terkait pelecehan seksual, • Kebijakan sekolah terkait pelecehan seksual • Mekanisme alur pelaporan pelecehan seksual di sekolah	<i>Power point presentation</i> <i>Flash Card</i>	Pelatihan (Presentasi dan tanya jawab)	Satu semester 100-120 menit per pertemuan.	Guru BK, berkolaborasi dengan kepolisian/ petugas KPAI	Evaluasi sesudah seminar, menggunakan tes formatif Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Komite	Komite mampu mengenali pelecehan seksual	Papan bimb- ingan (Kampanye)	Sosialisasi pesan positif pencegahan pelecehan seksual seperti : “Hentikan Pelecehan Seksual” “Mari saling menghormati” “Selamat datang di lingkungan anti pelecehan seksual”	Poster atau Fly- er atau papan mading BK atau website atau aplikasi smartphone	Kampa- nyen/Pemba- gian flyer, pemajangan mading/ span- duk, share via media sosial atau elektronik)	10-15 hari sekali / Satu semester sekali.	Guru BK berkolab- orasi dengan tim pencegahanpelece- han seksual	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang disusulkan oleh para komite mengenai kegiatan kampanye Laporan dilengkapi dokumen dan bukti foto sudah pernah dipasang
Komite	Komite mampu mengenali dan memahami informasi alur pelaporan masalah pelecehan seksual	Pengelolaan leaflet (Kampanye)	Sosialisasi mekanisme SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) alur pelaporan masalah pelecehan seksual dan tata cara menanggapi pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah	Leaflet atau Website atau poster aplikasi smartphone mengenai alur pelaporan pelecehan seksual	Kampanye (sebar leaflet, brosur, poster, atau pesan via website atau aplikasi smartphone)	10-15 hari sekali / Satu semester 1 kali	Guru BK dan tim pencegahan pelece- han seksual	Evaluasi proses dan hasil, berupa angket yang diberikan kepada komite yang menerima kampanye post- er maupun leaflet untuk mengetahui pendapatnya mengenai manfaat yang diperolehnya Hasil evaluasi akan disampaikan pada rapat mingguan sekolah disertai leaflet dan bukti dibagikan pada kelompok mikro- sistem
Komite	Komite mampu menegah pelecehan seksual	Layanan advokasi (FGD)	FGD tinjauan kembali kebijakan sekolah terkait masalah pelecehan seksual dan koordinasi pembuatan alur penanganan masalah pelecehan seksual pada anak	Angket	FGD (Sebar angket dan diskusi mutual sharing)	1 jam/ satu semester sekali	Guru BK	Evaluasi sesudah FGD, menyebarkan angket kesesuaian dengan kebutuhan dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Komite	Komite mampu mencegah dan memberdayakan diri dari pelecehan seksual	Bimbingan Kelas besar (pelatihan penberdayaan)	Cara-cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi atau menemui masalah pelecehan seksual, serta bagaimana SOP alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah.	Tayangan film Flash card	Pelatihan (Mutual sharing, Presentasi)	Satu semester sekali/ 100-120 menit per pertemuan.	Guru BK, kepolisian, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi sebelum, menggunakan note harapan dan tujuan Evaluasi hasil menggunakan contoh kasus, peserta diminta untuk menganalisa kasus yang berisikan upaya perlindungan apa yang perlu dilakukan dalam situasi tersebut dan angket capaian kesesuaian layanan Laporan evaluasi diliengkapi dengan surat/ foto yang relevan
Kepala sekolah	Kepala sekolah mampu mencegah pelecehan seksual dan mewujudkan sekolah anti pelecehan seksual	Menyusun dan melaporkan program kerja	Menyusun dan mengajukan rancangan pengaduan pengembangan layanan advokasi peningkatan pengetahuan pelecehan seksual, pengadaan SOP mekanisme alur pelaporan dan penanganan masalah pelecehan seksual di sekolah yang berkoordinasi dengan lembaga masyarakat (puskesmas, koperasi, KPAI, P2TP2A) disertai informasi ketersediaan sumberdaya layanan	Proposal program	konsultasi	-	Menyesuaikan Guru BK	-

20 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Kepala sekolah	Kepala sekolah mampu mencegah pelecehan seksual dan mewujudkan sekolah anti pelecehan seksual	Menyusun dan melaporkan program kerja	Meleporkan hasil susunan rancangan tim tanggap pelecehan seksual, peta survei dan tinjauan kebijakan sekolah terkait masalah pelecehan seksual dari kolaborasi guru, staf karyawan dan komite.	Dokumen laporan	konsultasi	Menyesuaikan	Guru BK	-
Kepala Sekolah	Kepala sekolah mampu mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola budaya dan lingkungan sekolah, dan memberdayakan peran serta masyarakat serta kemitraan sekolah.	Melakukan evaluasi	Konselor merekap keseluruhan hasil evaluasi layanan advokasi yang telah dilaksanakan, melaporkan capaian keberhasilan dan kendala dalam menjalankan layanan advokasi BK mengenai pengetahuan pelecehan seksual	Dokumen laporan	konsultasi	Menyesuaikan setelah seluruh kegiatan	Guru BK	-
Kepala sekolah	Mampu meng-evaluasi dan mengawasi kebijakan, program, penyeleenggaran dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan	Menyusun dan melaporkan program kerja	Konselor melakukan pengembangan, perbaikan layanan advokasi berdasarkan hasil dari evaluasi layanan sebelumnya	Proposal program	konsultasi	Menyesuaikan	Guru BK	-

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Sasaran Layanan Staf karyawan sekolah	Staf karyawan mampu mengenal pelecehan seksual	Bimbingan Kelas besar (Pelatihan pengetahuan sekual)	Informasi pengetahuan pelecehan seksual yang berisikan tentang : • Definisi pelecehan seksual, • Bentuk-bentuk pelecehan seksual, • Dampak pelecehan seksual, • Cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi pelecehan seksual • Sosialisasi Undang-undang perlindungan anak, • Sosialisasi kebijakan sekolah mengenai pelecehan seksual, • Sosialisasi SOP (Standard Operating Procedure) mekanisme alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah • Mekanisme alur penanganan pelecehan seksual di lembaga instansi • Sosialisasi SOP mekanisme menanggapi pelaporan masalah pelecehan seksual.	Angket	Pelatihan	1 kali per semester 1 X 120 menit per pertemuan	Guru BK, Komnas anak, kepolisian P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi hasil, dengan tes formatif untuk mengukur besarnya pengetahuan yang diperoleh peserta dari kegiatan tersebut. Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan
Sasaran Layanan Staf karyawan sekolah	Staf karyawan mampu mengenal pelecehan seksual	Layanan advokasi (survey)		Angket	FGD (Sebar angket survey mutual sharing)	1 jam/ satu semester sekali	Guru BK	Evaluasi sesudah survei, menyebarkan angket kesesuaian dengan kebutuhan dan kebermanfaatan Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan

22 Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Staf karyawan sekolah	Staf karyawan mampu mencegah pelecehan seksual	Kolaborasi (FGD/ Focus Group Discussion)	Perancangan SOP alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah.	Angket	FGD (Mutual sharing)	Menyesuaikan	Guru BK	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisi oleh staf karyawan mengenai kegiatan FGD
Staf karyawan sekolah	Staf karyawan mampu mencegah pelecehan seksual	Kolaborasi (FGD/ Focus Group Discussion)	Perancangan dan pengadaan tim tanggap pelaporan pelecehan seksual serta meninjau kembali kebijakan sekolah terkait masalah pelecehan seksual.	Angket	FGD (Mutual sharing)	Menyesuaikan	Guru BK	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisi oleh staf karyawan mengenai kegiatan FGD
Staf karyawan sekolah	Staf karyawan mampu mencegah pelecehan seksual	Kolaborasi (FGD/ Focus Group Discussion)	Guru BK/ Konselor dan staf karyawan pelajaran menjadi role model menciptakan lingkungan yang anti pelecehan seksual	-	Briefing, Mutual Sharing	menyesuaikan	-	Evaluasi proses dan hasil dari kesertian kebutuhan dan penilaian kerja dalam kolaborasi

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Guru	Guru mampu mengetahui pelecehan seksual	Bimbingan Kelas besar (pelatihan)	Informasi pengetahuan pelecehan seksual yang berisikan tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Definisi pelecehan seksual, • Bentuk-bentuk pelecehan seksual, • Dampak pelecehan seksual, • Cara mempertahankan diri yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat menghadapi pelecehan seksual • Sosialisasi Undang-undang perlindungan anak, • Sosialisasi kebijakan sekolah mengenai pelecehan seksual, • Sosialisasi SOP (Standard Operating Procedure) mekanisme alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah • Mekanisme alur penanganan pelecehan seksual di lembaga instansi • Sosialisasi SOP mekanisme menanggapi pelaporan masalah pelecehan seksual. • Mitos dan fakta mengenai pelecehan seksual yang berkembang di sekolah dan masyarakat 	<i>Power point presentation</i> Mutual sharing	Pelatihan (Presentation) Mutual sharing	1 kali per semester 100- 120 menit per pertemuan	Guru BK, Puskemas, kepolisian P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi hasil, dengan tes formatif untuk mengukur besarnya pengetahuan yang diperoleh peserta dari kegiatan tersebut. Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Guru	Guru mampu mengenali, memerlukan hambatan dan memerlukan solusi pelecehan seksual	Layanan advokasi (survey)	Peta survey lokasi rawan pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan apa solusi yang dipikirkan untuk mencegah pelecehan seksual di tempat tersebut	Angket	FGD (Sebar angket survey)	1 jam/ satu semester sekali	Guru BK	Evaluasi sesudah survei, menyebarkan angket kesesuaian dengan kebutuhan dan kebermanfaatan
					Laporan evaluasi dilengkapi dengan surat/ foto yang relevan			
Guru	Guru mampu mencegah pelecehan seksual	Kolaborasi (FGD/ Focus Group Discussion)	Perancangan SOP alur pelaporan masalah pelecehan seksual di sekolah.	Angket	FGD (Mutual sharing)	Menyeuaikan	Guru BK	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisi oleh staf karyawan mengenai kegiatan FGD
					Laporan dilengkapi dokument dan bukti foto sudah pernah dipasang			
Guru	Guru mampu mencegah pelecehan seksual	Kolaborasi (FGD/ Focus Group Discussion)	Perancangan dan pengadaan tim tanggap pelaporan pelecehan seksual serta meninjau kembali kebijakan sekolah terkait masalah pelecehan seksual.	Angket	FGD (Mutual sharing)	Menyeuaikan	Guru BK	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisi oleh staf karyawan mengenai kegiatan FGD
					Laporan dilengkapi dokument dan bukti foto sudah pernah dipasang			

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Guru	Guru mampu menegah pelecehan seksual	Kolaborasi	Guru BK/konselor dan guru mata pelajaran menjadi role model menciptakan lingkungan yang anti pelecehan seksual	-	Breefing, Mutual Sharing	menyesuaikan -	Guru BK, Komnas perempuan, P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi proses dan hasil dari kesuksesan kebutuhan dan penilaian kerja dalam kolaborasi
Komunitas/ anggota komunitas/ anggota masayarakat	wadah pem-berdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.	Kolaborasi dengan lembaga/ instansi	Anggota masyarakat penting membangun menyediakan materi atau sebagai narasumber pembicara dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan di sekolah.	-	Breefing, Mutual Sharing	menyesuaikan	Guru BK, Komnas perempuan, P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi proses dan hasil dari berkolaborasi layanan advokasi pencegahan pelecehan seksual
Komunitas/ anggota masayarakat penting (Puskemas, kepolisian, KPAI, P2TP2A)	wadah pem-berdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.	Kolaborasi dengan lembaga/ instansi	Membuat SOP alur pelaporan dan SOP alih tangan kasus penanganan pelecehan seksual	ATK (Alat Tulis Kantor), PPT	Breefing, Mutual Sharing	menyesuaikan	Guru BK, Komnas perempuan, P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi proses dan hasil dari berkolaborasi layanan advokasi pencegahan pelecehan seksual
Komunitas/ anggota masayarakat penting	wadah pem-berdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.	Kolaborasi dengan lembaga/ instansi	Menciptakan data profesional sumberdaya dan layanan yang disediakan dalam komunitas kepada komite orang tua	Angket	Breefing, Mutual Sharing	menyesuaikan	Guru BK, Komnas perempuan, P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi proses, dengan instrumen evaluasi berupa angket yang diisi oleh para komite mengenai kegiatan kampanye
Komunitas/ anggota masayarakat penting	wadah pem-berdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.	Kolaborasi dengan lembaga/ instansi	Menciptakan data profesional sumberdaya dan layanan yang disediakan dalam komunitas kepada komite orang tua	Angket	Breefing, Mutual Sharing	menyesuaikan	Guru BK, Komnas perempuan, P2TP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	Evaluasi hasil, dengan tes formatif untuk mengetahui besarnya pengetahuan yang diperoleh komite dari kegiatan tersebut.

Sasaran Layanan	Kompetensi	Kegiatan	Materi	Media	Metode	Waktu dan tempat	Pelaksana	Evaluasi
Komunitas/anggota masyarakat penitiging	wadah pem-berdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.	Kolaborasi dengan lembaga/instansi	Rekap laporan evaluasi kolaborasi yang telah terjalin, evaluasi mengenai kebutuhan dan kebermanfaataan ketersediaan kerjasama dengan komunitas/masyarakat penting tersebut	Berkas Laporan	Briefing, Mutual Sharing	Menyesuaikan	Guru BK, Komnas perempuan, P2IP2K, KPAI dan tim pencegahan pelecehan seksual	-